

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adrian Sutedi. 2011. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik.
Jakarta:Sinar Grafika.

Ali, Z. (2014). Metodologi Penelitian Hukum.

Amiruddin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta : PT
Raja Grafindo. Bambang Sunggono. 2012. Metodologi Penelitian
Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Bhekti Arum Lestari dan Lina Miftahul Jannah . (2018). Tinjauan
Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
Dalam Pepres Nomor 16 Tahun 2018. Jurnal Administrasi Dan
Manajemen , Vol 9 No.1 .

C.H. T. Kansil. 1984. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta:
Bina Aksara.

David, B. (2003). Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi. Jakarta : Raja
Grafindo Persada.

Derry Kurniawan dan Mirza Abdi . (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan
Terhadap Kepuasan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
(UMKM) Dalam Pembuatan Perizinan Usaha Di Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu. Jurnal Manajemen dan Bisnis , Vol 2.

Fajri Nursyamsi, “Pengawasan Peraturan Daerah Pada Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Regional
Government Pengawasan Peraturan Daerah Pendahuluan

Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Oleh Pemerintah Daerah Merupakan Ciri Khas Dar” 2, no. 3 (2015): 523–540 Fajri Nursyamsi, “Pengawasan Peraturan Daerah Pada Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Regional Government Pengawasan Peraturan Daerah Pendahuluan Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Oleh Pemerintah Daerah Merupakan Ciri Khas Dar” 2, no. 3 (2015): 523– 540

Hardiansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik Konsep , Dimensi Dan Indikator Implementasinya . Yogyakarta : Gava Media.

Hasni. 2008. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Heri Kusmanto dan Warjio . (2019). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah . Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial , Vol.11.

Kaligis, O. (2006). Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka, Terdakwa dan Terpidana. Bandung : Alumni.

Lalolo Krina, 2003, Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Traansparansi dan Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance, BAPPENAS, Jakarta, h.6

Lutfi Efendi, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Bayumedia Sakti Group, Malang, 2004.

Mahmudi. (2007). Majemen Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Marihot Pahala Siahaan. 2008. Hukum Bangunan Gedung Di Indonesia.
Jakarta: Raja Grafindo.

Marzuki. (1983). Metodologi Riset . Yogyakarta : PT Hanindita Offset.

Philipus M. Hadjon. 2001. Pengantar Hukum Administrasi
Negara. Yogyakarta:Gajah Mada University Press.

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo S.H, Masalah Penegakan Hukum. Bandung:

Sinar Baru. Puang, V. M. (2015). Hukum Pendirian Usaha Dan

Perizinan . Yogyakarta : Budi Utama. Pudiyatmoko, S. (2009).

Problem Dan Upaya Pembinaan Perizinan. Jakarta : Gramedia.

Ramdhana, M. F. (2020). Pelayanan Publik. Jakarta: Yauasan Kita
Menulis.

Ridwan HR. 2007. Hukum Administasi Negara. Jakarta. PT Raja Grafindo
Persada.

Ridwan HR. 2008. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Riendy, Y. (2021). Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap
Otonomi Daerah Ditinjau Dari Pasal 6 UU No.32 Tentang
Perlindungan Hidup. Jurnal Hukum, 4.

Siregar, F. Y. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan
Usaha di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Undang-undang Cipta
Kerja . Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.7 No.2.

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Rajagrafindo Persada,
Jakarta 2009, him.,13

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 1984, him. 49 Soerkanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta : Universitas Press.

Soewignjo. (1986). Dasar-Dasar Organisasi Manajemen. Jakarta : PT. Ghalia Indonesia . Sofyan, P. S. (2004). Sistem Pengawasan Manajemen. Jakarta : PT. Pustaka Quantum.

Sri Pudyatmoko. 2009. Perizinan Problema dan Upaya Pembenahan. Jakarta: PT Grasindo.

Soemitro dalam Soejono& Abdurahman. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).

Triana, A. (2020). Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil. Jurnal Pelita Ilmu, 14.

Victorianus M.H, (2015) Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan. Yogyakarta : Budi Utama, hal 1.

Victor Situmorang. Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Bina Aksara. Widaningsih, A. (2018). Aspek Hukum Kewirausahaan

. Malang : Polinema Pers

Zainuddin Ali. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 susunan organisasi
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Perindustrian dan Tenaga Kerja

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah (UMKM)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan
perizinan berusaha di daerah

WEBSITE

<http://perkotaan.bpiw.pu.go.id> 3 Juni 2022.

<https://dpmptsptk.bukittinggikota.go.id> 3 Juni 2022.

